



## **Pengawasan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara**

**M. Syukur<sup>1</sup>, Mohammad Rizal Mamala<sup>2</sup>, Nuraisyah<sup>3</sup>**

*E-Mail* : syukurpacoppori79@gmail.com<sup>1</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Palu<sup>1,2</sup>  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Tadulako<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*This research is to find out how the Camat Supervision in Government Administration at the Soyo Jaya District Office, North Morowali Regency. The types of data used are primary data and secondary data. Data collection techniques, carried out through observation, interviews, and documentation. Informant withdrawal technique using purposive. The number of informants in this study amounted to 5 people. The theory used is the theory of Siagian, which consists of 2 (two) aspects, namely: direct supervision and indirect supervision. Based on the results of the research conducted, that the Soyo Jaya Camat in organizing activities carried out by his employees (subordinates), has not been able to work effectively and efficiently and the supervision process carried out by the Soyo Jaya Camat is inconsistent and not carried out properly, it has an impact on performance. the organization as a whole is primarily concerned with the discipline of the state civil apparatus (ASN). The data found by researchers in the field lead to indications that the implementation of supervision is not going well, it can be seen from the emergence of several problem phenomena, namely the Camat is less regular in checking employee attendance through attendance, so that it has an impact on the organization of activities and has an impact on employee flexibility. in committing fraud against filling absenteeism by entrusting attendance attendance. In addition, the lack of directives and explanations by the Camat to employees regarding the rules and guidelines in every work implementation given to employees, so that compliance with the implementation of work is often ignored by employees which has an impact on work results that are less than optimal. Thus, from the two aspects of supervision above, there are still several things that need to be addressed, so that the supervision provided can be maximized.*

**Keywords:** *Supervision, Consistent and Activities*

### **LATAR BELAKANG**

Efektifitas pelaksanaan seluruh kegiatan di lembaga publik diperlukan kehadiran pengawasan atau *controll* dalam rangka meningkatkan efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan program kelembagaan sehingga mampu memberikan

hasil yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu dalam menjamin adanya kelancaran produktifitas kerja dari para pegawai serta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka perlu dilakukannya tindakan pengawasan. Penerapan fungsi pengawasan

merupakan tugas, hak, dan wewenang serta tanggung jawab dari seorang pemimpin organisasi yang bersangkutan dalam upaya menghindari kemungkinan timbulnya keadaan yang tidak menguntungkan bagi organisasi.

Dalam suatu organisasi, khususnya di Kantor Kecamatan Soyo Jaya, camat sebagai pemimpin harus memberikan pengarahan atau bimbingan kepada para bawahannya tentang apa yang harus dikerjakan serta memberikan penjelasan terhadap apa yang belum diketahui oleh bawahannya. Camat melakukan pengawasan terhadap kinerja pegawai tersebut bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada bawahannya, yakni sejauh mana pengaruhnya terhadap pelaksanaan tugas guna tercapainya tujuan organisasi. Dengan adanya pengawasan dari Camat diharapkan akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi berkesinambungan aktifitas organisasi sehingga dapat terjamin pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi pengawasan menjadi fokus utama yang harus dilakukan oleh Camat Soyo Jaya supaya Camat sebagai pemimpin dapat mengetahui kegiatan-kegiatan nyata dari setiap aspek dan permasalahan dari pelaksanaan tugas-tugas dalam lingkungan suatu organisasi yang masing-masing, selanjutnya bilamana terjadi penyimpangan maka dapat dengan segera untuk mengambil langkah-langkah yang seperlunya dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008

Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berkaitan dengan proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin, dalam hal ini dilakukan oleh Camat Soyo Jaya dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan para pegawai (bawahannya), diharapkan mampu bekerja secara efektif dan efisien agar tercapainya tujuan dari visi misi Kecamatan Soyo Jaya.

Namun kenyataannya secara faktual, proses pengawasan yang dilakukan oleh Camat Soyo Jaya kerap kali tidak terlaksana dengan baik, hal itu berdampak pada kinerja organisasi khususnya di Kantor Kecamatan Soyo Jaya secara keseluruhan terutama menyangkut tentang kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), sebagaimana dari data temuan yang mengarah adanya indikasi yang menunjukkan pelaksanaan pengawasan yang kurang berjalan dengan baik oleh Camat Soyo Jaya, terlihat dari munculnya beberapa fenomena permasalahan, yaitu Camat Soyo Jaya kurang teratur dalam memeriksa kehadiran pegawai melalui absensi kehadiran, sehingga berdampak penyelenggaraan kegiatan dan berdampak pada keleluasaan pegawai dalam melakukan kecurangan terhadap pengisian absensi dengan tindakan menitip absensi kehadiran tersebut, hal ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh Camat dengan melakukan pengecekan mengenai kebenaran laporan hasil kerja yang dibuat oleh pegawai menjadi tidak optimal.

Selain itu, kurangnya pemberian pengarahan dan penjelasan oleh Camat kepada pegawai mengenai peraturan dan pedoman dalam setiap pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada pegawai, sehingga kepatuhan atas pelaksanaan pekerjaan seringkali tidak diindahkan oleh pegawai yang berdampak pada hasil pekerjaan yang kurang maksimal. Permasalahan lainnya yaitu Camat Soyo Jaya jarang melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai dengan membandingkan

antara hasil pekerjaan dengan rencana kegiatan sebelumnya.

Berdasarkan masalah tersebut, penulis tertarik untuk menggali realisasi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Camat Soyo Jaya dalam penyelenggaraan kegiatan di Kantor Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali Utara, sehingga pada akhirnya, dapat diketahui pelaksanaan pengawasan sudah berjalan dengan baik atau masih diperlukan adanya perubahan guna dapat mencapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan manajemen yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak.

Menurut Siswandi dan Iman (2009) mengemukakan bahwa pengawasan ialah suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara tujuan organisasi dengan manajemen sehingga tidak dapat dipungkiri sesungguhnya manajemen merupakan dasar bagi tercapainya suatu tujuan organisasi. Penjelasan yang dikemukakan oleh Muchsan (2000), bahwa pengawasan bermanfaat atau tidak disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : 1). Melemahnya pengawasan oleh atasan langsung, dan; 2). Melemahnya sistem pengendalian manajemen.

Dalam melakukan pengawasan, terdapat maksud dan tujuan di dalamnya. Menurut Situmorang dan Jahir (1994), maksud dilaksanakannya pengawasan adalah untuk: 1). Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak; 2). Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang

baru; 3). Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan; 4). Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak, serta; 5). Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standart.

Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan menggunakan dua macam teknik (Siagian, 2007), yaitu:

1. Pengawasan langsung yaitu dengan cara mendatangi dan memeriksa secara langsung terhadap objek yang diawasi sehingga bila dianggap perlu bisa langsung memberikan petunjuk dan instruksi ataupun keputusan secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh (tidak bersentuhan langsung) dengan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh para bawahan dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis

## **METODE**

Dasar penelitian yang digunakan yaitu kualitatif pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan alamiah (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif oleh karena itu, penelitian ini disebut penelitian kualitatif sedangkan yang dimaksud penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah sebagai lawanya adalah eksperimen dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yang dianggap mengetahui pokok permasalahan

yang sedang diteliti atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yang diamati dan di catat untuk pertama kalinya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, studi pustaka, hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian, serta sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

Data primer diperoleh dari informasi yang dikemukakan oleh informan dalam proses wawancara. Berdasarkan hal ini, informan yang dijadikan sebagai penyedia data primer antara lain : 1). Sekretaris Camat; 2). Kepala Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian; 3). Kasi Pemerintahan; 4). Kasi Pembangunan, dan; 5). Kasi Ketentraman dan Ketertiban.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi : Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai objek yang diteliti.
2. Wawancara : Teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan dialog langsung dengan sejumlah orang yang dianggap mengetahui dan mengerti akan permasalahan yang diteliti.
3. Dokumentasi : Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa dokumentasi atau laporan tertulis yang dibutuhkan dalam penelitian ini kemudian dipelajari dan dianalisis.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model analisis data interaktif. Miles dan Huberman (2007) menjelaskan bahwa model analisis interaktif terdiri dari tiga hal utama, yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk

yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

## **PEMBAHASAN**

Pada dasarnya bahwa tugas Camat dalam melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Camat Soyo Jaya, seutuhnya dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan kearah kemajuan yang lebih baik. Selain itu, pengawasan Camat terhadap kinerja pegawai berupa pengawasan yang berupa kinerja para pegawai yang melakukan proses pelayanan publik terhadap kegiatan Administrasi yang modern. Oleh karena itu pengawasan Camat tersebut juga tidak hanya melalui pengawasan Camat yang berupa kinerja pegawai, akan tetapi juga pengawasan Camat terhadap alat-alat pendukung dari proses kinerja pegawai untuk memberikan pelayanan maksimal terhadap masyarakat.

### **1. Pengawasan Langsung**

Pengawasan yang efektif membantu usaha dalam mengatur pekerjaan agar dapat terlaksana dengan baik. Fungsi pengawasan merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini terdiri dari tugas-tugas memonitor dan mengevaluasi aktivitas perusahaan agar target perusahaan tercapai. Dengan kata lain fungsi pengawasan menilai apakah rencana yang ditetapkan pada fungsi perencanaan telah tercapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan, diketahui bahwa laporan di tempat sudah berjalan dengan baik seiring dengan adanya inspeksi secara langsung yang dilakukan oleh camat. Dengan adanya laporan ditempat pegawai dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan penuh tanggung jawab dalam melakukan kegiatan pekerjaan dan adanya pengawasan yang dilaksanakan Camat akan menciptakan ketertiban di lingkungan kerja kecamatan. Pembahasan penulis terhadap ketiga bentuk dari pengawasan langsung (Inspeksi

langsung, Melakukan koreksi langsung dan Koreksi di tempat) tersebut dapat dijelaskan bahwa, pengawasan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pemantauan, pemeriksaan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran.

## **2. Pengawasan Tidak Langsung**

Camat sebagai pelaksana fungsi pengawasan melakukan pengawasan tidak langsung dengan cara memonitoring atau memantau hasil kerja bawahan melalui laporan Sekretaris Kecamatan dan seluruh Kepala Seksi untuk melihat dan menilai sejauh mana kinerja pegawai. Dalam pengawasan tidak langsung ini yang dituntut adalah kesadaran dari pribadi masing-masing pegawai itu sendiri dan tidak adanya kebiasaan untuk mengabaikan pekerjaannya, yang dimaksud ialah apabila ada atasan baru bekerja tetapi begitu atasannya tidak ada ditempat maka pekerjaan di abaikan dan ditinggal, sebaliknya yang dituntut adalah kesadaran sebab pelaporan ini memang yang kedepankan yang secara tidak langsung yang maksudnya laporan dapat melalui dari Sekretaris Camat atau Kepala Seksi Kecamatan.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dari kedua bentuk pengawasan tidak langsung (Laporan tertulis dan Laporan lisan) terlihat bahwa laporan lisan sudah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari adanya laporan yang disampaikan oleh serketaris camat dan kepala seksi kepada camat berupa laporan lisan yang dilakukan setiap saat ketika diminta oleh camat dan pada saat kordinasi terbatas.

## **KESIMPULAN**

Dari penyajian data fokus penelitian dan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Camat Soyo Jaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang

dilakukan para pegawai (bawahannya), belum mampu bekerja secara efektif dan efisien serta proses pengawasan yang dilakukan oleh Camat Soyo Jaya kerap kali tidak terlaksana dengan baik, hal itu berdampak pada kinerja organisasi khususnya Kecamatan Soyo Jaya secara keseluruhan terutama menyangkut tentang kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN).

Data temuan yang ditemukan peneliti di lapangan, mengarah adanya indikasi yang menunjukkan pelaksanaan fungsi pengawasan yang kurang berjalan dengan baik oleh Camat Soyo Jaya, terlihat dari munculnya beberapa fenomena permasalahan, yaitu Camat Siniu kurang teratur dalam memeriksa kehadiran pegawai melalui absensi kehadiran, sehingga berdampak penyelenggaraan kegiatan dan berdampak pada keleluasaan pegawai dalam melakukan kecurangan terhadap pengisian absensi dengan tindakan menitip absensi kehadiran. Selain itu, kurangnya pemberian pengarahan dan penjelasan oleh Camat kepada pegawai mengenai peraturan dan pedoman dalam setiap pelaksanaan pekerjaan yang diberikan kepada pegawai, sehingga kepatuhan atas pelaksanaan pekerjaan seringkali tidak diindahkan oleh pegawai yang berdampak pada hasil pekerjaan yang kurang maksimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- [1] Miles. B. M dan Huberman. A. M. (2007). *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- [2] Muchsan. (2000). *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- [3] Siagian. S. P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.

- [4] Siswandi dan Iman. I. (2009). *Aplikasi Manajemen Perusahaan*. Mitra Wicana Media. Jakarta
- [5] Situmorang. M. V dan Jahir. J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta

**Dokumen**

- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- [7] Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah